

Analisis Faktor Penolakan Warga Negara Indonesia Eks ISIS ke Indonesia

Analysis of the Rejection Factors for the Return of Ex-ISIS Indonesian Citizens to Indonesia

Fajri Adha & Gonda Yumitro

Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: fajriadha140301@gmail.com & gonda@umm.ac.id

Abstract

This article aims to analyze several factors that caused the government to reject the return of ex-ISIS Indonesian citizens to Indonesia. This research was explanatory research using a qualitative approach. Meanwhile, the data collection technique was a literature study using the Google Scholar search engine and Harzing Publish or Perish. The authors used Miles and Huberman's data analysis technique using the interactive model qualitative data analysis technique. The authors found that two factors influenced the rejection of the return of ex-ISIS Indonesian citizens: internal and external factors. Internal factors consist of political factors, security factors, and cultural factors. Meanwhile, the external factors related to the Global War on Terrorism (GWOT). As for the political factor, the ex-ISIS members have a radical ideology for gaining their political interests. Then from the security factor, it was found that the ex-ISIS members had combat skills and knowledge, which would significantly affect the security and living conditions of the community. Finally, from cultural factors, ex-ISIS members tend to have an intolerant nature resulting from their ideology. The existence of this intolerant nature will undoubtedly clash with the diverse cultural conditions of the Indonesian people. The external factor is Indonesia's participation in the effort to fight global terrorism together with other countries.

Keywords: *ISIS, Policy; Government; Radicalism; Terrorism.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis beberapa faktor yang jadi penyebab pemerintah menolak kedatangan WNI eks-ISIS ke Indonesia. Artikel ini pada dasarnya termasuk dalam penelitian yang bersifat eksplanatif dengan memakai pendekatan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan menggunakan mesin pencarian Google Scholar dan juga Harzing Publish or Perish. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini adalah teknik analisis data kual-

itatif model interaktif oleh Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa penolakan kepulangan WNI eks-ISIS ini pada dasarnya dipengaruhi dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang terdiri dari faktor politik, faktor keamanan, dan faktor budaya. Kedua adalah faktor eksternal yang mana berkaitan dengan kebijakan Global War on Terrorism (GWOT). Adapun dari faktor politik adalah para anggota eks-ISIS memiliki ideologi bersifat radikal yang sarat akan kepentingan politik. Kemudian dari faktor keamanan ditemukan bahwa para anggota eks-ISIS memiliki keterampilan dan pengetahuan bertempur, hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi keamanan dan kondisi kehidupan masyarakat. Terakhir dari faktor budaya ditemukan bahwa para anggota eks-ISIS cenderung memiliki sifat intoleran yang dihasilkan dari ideologi mereka. Adanya sifat intoleran ini pastinya akan berbenturan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Adapun dari faktor eksternal adalah keikutsertaan Indonesia dalam usaha memerangi terorisme global bersama dengan negara-negara lain.

Kata Kunci: ISIS; Kebijakan; Pemerintah; Radikalisme; Terorisme.

Pendahuluan

ISIS merupakan organisasi yang menjadi pewaris resmi Al-Qaeda. Kelompok ini didirikan oleh Abu Mus'ab Al-Zarqawi dengan baiat resmi oleh Osama bin Laden pada tahun 2004¹. Awalnya organisasi ini bernama *Qa'idatul Jihad Fii bilad al-Rafidayn*. Namun Zarqawi sendiri kemudian terbunuh di tahun 2006 pada saat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Setelah Zarqawi terbunuh, organisasi ini kemudian dipimpin oleh Abu Hamzah Muhajir dan juga Abu Umar Al-Baghdadi lalu berganti nama menjadi *Islamic of Iraq*. Pada tanggal 19 April 2010 Hamzah dan Umar dibunuh oleh pasukan Irak dan Amerika. Pasca terbunuhnya Hamzah dan Umar, kepemimpinan organisasi ini kemudian diambil oleh warga Irak yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Mulanya Abu Bakar juga mengganti nama organisasi ini menjadi "Islamic State of Iraq and the Levant" (ISIL), tetapi pada akhirnya masyarakat global lebih mengenalnya dengan nama "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS)².

ISIS sendiri kemudian semakin berkembang dan gerakan organisasi ini juga mendapat dukungan dan simpatisan umat muslim seluruh dunia yang mendukung ideologi Daulah Islamiyah, termasuk halnya umat muslim Indonesia. Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja I, Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa "ada

¹ Fredy B.L. Tobing and Erwin Indradjaja, 'Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.365>>.

² Ibid

sekitar 700 Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tinggal di Suriah dan menjadi anggota ISIS³. Akhirnya pada tahun 2018, basis kekuatan organisasi yang terletak di Kota Mosul dihancurkan oleh pasukan Amerika dan Sekutunya yang mana hal ini pada akhirnya membuat organisasi ini mulai melemah⁴. Puncak melemahnya ISIS terjadi pada tahun 2019, Abu Bakar Baghdadi sebagai pemimpin ISIS pada saat itu meninggal seketika saat serangan udara yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat. Kondisi ini pada akhirnya menjadi pertanda kekalahan dan keruntuhan ISIS. Dengan terdesaknya ISIS, pemerintah setempat juga telah membuat kebijakan agar secepatnya untuk membubarkan organisasi ini. Kondisi ini pada akhirnya juga membuat anggota kombatan ISIS bingung dan membuat mereka berpikir untuk kembali pulang ke negara asal mereka masing-masing.

Diperkirakan ada sekitar kurang lebih 70.000 mantan kombatan eks ISIS yang menjadi imigran ilegal dan berusaha kembali untuk pulang ke negara asalnya, termasuk halnya WNI eks ISIS yang juga mencoba pulang ke Indonesia⁵. Isu kepulangan WNI eks ISIS ini pada akhirnya banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dimana kelompok pro berpandangan bahwa fenomena ini harus dilihat melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok pro berpendapat, WNI eks ISIS tidak hanya beranggotakan para kaum pria, tetapi juga banyak para perempuan yang menjadi janda, atau anak-anak yang menjadi yatim piatu, karena ditinggal mati oleh suami atau ayahnya saat di medan pertempuran. Sedangkan kelompok kontra berpendapat bahwa kepulangan WNI eks ISIS ini dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Mereka membawa nilai-nilai ideologi ISIS yang sangat banyak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Indonesia. Selain itu, kelompok kontra juga berargumen bahwa kepulangan WNI eks ISIS ini dikhawatirkan membawa pengaruh atas penyebaran radikalisme dan terorisme⁶. Kelompok kontra sendiri kebanyakan berasal dari kalangan yang menjadi korban berbagai aksi terorisme di Indonesia, contohnya seperti tragedi bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, bom Thamrin, bom Mapolresta Surakarta, dan rentetan aksi terorisme lainnya.

ISIS dan seluruh jaringannya pada dasarnya bertujuan menciptakan negara Islam secara Kaffah, dimana untuk mencapai tujuannya, mereka menjalaninya dengan cara kekerasan. Tak hanya di wilayah Timur Tengah, organisasi ini kerap melakukan aksi kekerasannya hingga di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Maka tidak heran jika organisasi ini menjadi salah satu organisasi kejahatan transnasional yang

³ Robertus Wardi, 'Menhan: 700 WNI Jadi Anggota ISIS'.

⁴ Farhan Arif Sumawiharja and Adis Imam Ismunandar, 'Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah)', *Jurnal Keamanan Nasional*, VI.1 (2020), 107.

⁵ Suci Amaliyah and Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13.

⁶ A M Hidayat, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Jurnal Transborders*, 1.1 (2017), 1-19 <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5647%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5647/4/4. BAB II.pdf>>.

dapat mengancam keamanan sebuah negara⁷. Ideologi ISIS sendiri sangat bersifat radikal dan cenderung mengarah pada aksi terorisme. Radikalisme dan terorisme sendiri pada dasarnya merupakan sebuah perbedaan. Radikalisme pada dasarnya merupakan sikap yang sangat mendambakan perubahan secara total, yang mana usaha untuk melakukan perubahan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan berbagai aksi ekstrem⁸.

Sedangkan terorisme dapat kita artikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dengan tujuan untuk menakuti masyarakat melalui aksi atau serangan yang terkoordinasi. Bentuk-bentuk kejahatan terorisme pada dasarnya dapat berupa pembunuhan, pengeboman, pembajakan, serangan bersenjata, perampokan, bahkan penghadangan⁹. Bertolak dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa radikalisme dimaknai sebagai sebuah proses seseorang menuju kepada aksi terorisme. Aksi-aksi terorisme pada dasarnya bersifat radikal, namun orang yang memiliki paham radikalisme belum tentu akan melakukan aksi terorisme¹⁰.

Pada 11 Februari 2020 pemerintah melalui Menko Polhukam, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, secara resmi merilis kebijakan untuk tidak menerima kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Untuk anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun, dalam kesempatan tersebut pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan keputusan untuk pemulangannya. Walaupun belum diketahui secara pasti jumlah anak-anak yang ada di sana, namun berdasarkan info yang didapat dari Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sudah terdata ada 228 orang yang teridentifikasi dari 689 WNI eks kombatan ISIS di sana¹¹. Sedangkan dari Palang Merah Internasional, menyebutkan ada sekitar 689 Indonesia yang teridentifikasi sebagai *foreign terrorist fighters* (FTF) yang kebanyakannya berafiliasi dengan ISIS. Sementara itu ada kurang dari 1.800 WNI masih belum teridentifikasi¹².

Adanya keputusan pemerintah tersebut menuai banyak kontroversi di masyarakat, tidak terkecuali beberapa lembaga juga menyorohtnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah salah satu institusi yang menanggapi mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak menganggap semua WNI yang ada disana sebagai mantan kombatan ISIS. Seharusnya pemerintah melalui BNPT melakukan pendataan untuk profil mereka, agar pemerintah dapat mengetahui

⁷ Aswan Haryadi and Nurhasanah Muthia, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Transborders: International Relations Journal*, 1.1 (2018), 1-19 <<https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>>.

⁸ Muhammad Muchith and Muhammad Saekan Muchith, 'Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan', *ADDIN*, 10.1 (2016), 163-80 <<https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>>.

⁹ Syamruddin Nasution, 'Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik', *Jurnal An-Ni-da'*, 41.1 (2017), 1-15.

¹⁰ Nur Khamid, 'Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016), 123 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>>.

¹¹ Sasmito Madrim Ghita Intan, 'Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS'.

¹² Suci Amaliyah dan Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13

profil mereka dengan jelas. Komnas HAM juga memberi saran kepada pemerintah untuk menerapkan pasal 26 B yang isinya memberi hukuman penjara dalam kurun waktu 7-12 tahun¹³.

Selain Komnas HAM, Pengamat dan Ahli bidang Terorisme pada Universitas Indonesia (UI), Ridwan Habib berargumen bahwa “keputusan pemerintah ini merupakan keputusan yang tepat”. Namun disisi lain pemerintah juga harus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan karena hal keputusan pemerintah ini memiliki kemungkinan terjadinya balas dendam anggota ISIS yang ada di dalam negeri¹⁴.

Dari beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, ada banyak kajian pembahasan dan analisis di kalangan akademisi mengenai keputusan Pemerintah Indonesia dalam menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Diantaranya ada penelitian Abdul Ghafur, dkk yang berjudul “Strategi Menghadapi Gerakan ISIS dan Ancaman Keamanan di Indonesia” menyebutkan bahwa watak dari anggota ISIS sendiri sangat bertentangan hakikat watak Islam yang memprioritaskan dialog dan perdamaian¹⁵. Kemudian Dina Oktarina dan Adhiatma Nanda dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa adanya kepulangan Eks-ISIS ini tentunya sangat mengancam keamanan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Indonesia¹⁶. Berbeda halnya dengan penelitian Elga Andina yang menjelaskan bahwa adanya kebijakan yang menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ini pada akhirnya nanti akan berdampak dengan negara yang menampung para Eks-ISIS tersebut. Bahkan pada akhirnya hal ini dapat menimbulkan konflik antara Indonesia dengan WNI Eks-ISIS yang ada di negara lain¹⁷. Lalu di penelitian Abdurrahman dan Iffatin juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS pada dasarnya bukan merupakan keputusan yang tepat mengingat Pemerintah seharusnya mempertimbangkan hak kemanusiaan mereka mengingat tidak semua dari mereka bersukarela menjadi bagian dari kombatan ISIS¹⁸.

Sebagaimana dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penelitian sebelumnya pada dasarnya hanya berupaya mendiskusikan dan menganalisis hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah pasca mereka memutuskan untuk menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Oleh karena itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab mengapa Pemerintah

¹³ Abdurrahman Hakim and Iffatin Nur, ‘Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS’, *Al Daulah*, 9.1 (2020), 81-98.

¹⁴ Elga Andina, ‘Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS’, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12 (2020).

¹⁵ Depiet Pristine Adi Abdul Ghafur Santosos, Eiliyah Rifaini, ‘Strategi Menghadapi Gerakan ISIS Dan Ancaman Keamanan Di Indonesia’, *Journal Civic and Social Studies*, 2020, 1-10.

¹⁶ Dina Oktarina and Adhiatma Nanda Wardhana, “Jihad Melawan Ideologi Radikal ISIS Di Indonesia”, *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2016), 187-98.

¹⁷ Andina, *Op. Cit.*

¹⁸ Hakim and Nur, *Op. Cit.*

menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka analisis faktor kebijakan pemerintah dalam menolak pulangannya WNI eks ISIS menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Kemudian fokus rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah, “bagaimana faktor penyebab penolakan kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia?”

Metodologi

Artikel ini merupakan artikel yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Kemudian teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan memakai teknik studi pustaka. Peneliti nantinya akan menggunakan mesin pencarian *Google Scholar* dan *Harzing Publish or Perish* dalam mengumpulkan data-data tersebut. Kata yang kunci yang digunakan dalam pengumpulan studi pustaka adalah ISIS, Kebijakan, Pemerintah, Radikalisme, Terorisme.

Mengenai teknik analisis data, peneliti akan memakai teknik analisis data kualitatif model interaktif milik Miles dan Huberman. Dalam model interaktif milik Miles dan Huberman ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni reduksi data dan *display data*¹⁹.

Reduksi data pada dasarnya adalah sebuah proses pemilihan data yang dibutuhkan sebagai pemusatan data untuk proses penyederhanaan data di lapangan, serta sebagai transformasi data-data kasar yang ada di lapangan²⁰. Sehingga data yang akan direduksi dalam penelitian ini merupakan beberapa data yang memiliki keterkaitan dengan penolakan terhadap pemulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Adanya reduksi ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Display data atau Penyajian data merupakan sebuah paparan mengenai sekumpulan informasi yang telah tersusun dan hal ini kemudian akan memberikan kemungkinan munculnya sebuah kesimpulan atau pengambilan tindakan²¹. Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan menyajikan data dengan berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Adanya penyajian data ini maka diharapkan dapat memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

Selain itu, guna mempermudah analisis penulis dalam kajian penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep Keamanan Komprehensif. Konsep Keamanan Komprehensif ini menilai bahwa ancaman keamanan suatu negara pada saat ini tidak

¹⁹ Matthew Miles, A. Huberman, and Johnny Saldaña, ‘Sampling: Bounding the Collection of Data’, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 26–30.

²⁰ Muhammad Agum Bikhransyah, ‘Proposal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi Untuk Mengetahui Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kota Batu’, *Endocrine*, 9.May (2020), 6.

²¹ Ibid

hanya berasal dari militer saja, namun juga dapat dipengaruhi dari adanya ideologi, budaya, maupun fenomena tertentu yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan atau ketertiban manusia. Maka dari itu, Keamanan Komprehensif menuntut suatu negara agar lebih menyiapkan beberapa aspek yang berkaitan dalam pengelolaan keamanan suatu negara²². Lebih lanjut lagi bahwa konsep keamanan komprehensif ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep keamanan lainnya, yakni²³:

- Konsep Keamanan Manusia. Konsep ini menganggap bahwa manusia merupakan objek utama dalam keamanan negara. Konsep ini melihat bahwa segala hal yang sepele pada dasarnya dapat mempengaruhi keamanan manusia. Jika ada krisis atau fenomena yang dapat mengancam keamanan manusia maka negara merupakan aktor yang harus bertanggung jawab. Jika negara tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka aktor lain dapat mengintervensi masalah tersebut
- Sekuritisasi. Sekuritisasi sendiri pada dasarnya merupakan sebuah konsep dimana konsep ini mencoba menekan suatu fenomena agar menjadi suatu ancaman dengan menggunakan politisasi yang ekstrim.
- Keamanan Masyarakat. Konsep Keamanan Masyarakat ini menekankan tentang bagaimana kemampuan kelompok masyarakat tertentu agar tetap mempertahankan ciri khas identitas mereka seiring adanya fenomena-fenomena atau aktor-aktor yang mengancam keamanan mereka. Sehingga bisa kita katakan bahwa konsep ini lebih mementingkan identitas khusus dari beberapa kelompok masyarakat dari setiap ancaman yang ada.

Konsep keamanan komprehensif menganggap permasalahan keamanan yang ada pada saat ini harus diselesaikan melalui kesesuaian dengan melihat fenomena tersebut. Sehingga dalam penyelesaiannya masalah keamanan tidak harus dengan menggunakan kekuatan militer akan tetapi bisa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya. Salah satunya jika fenomena tersebut mengancam keamanan dalam sektor politik maka diperlukan kebijakan yang dapat menekan atau mencegah hal yang dapat mengancam sektor politik tersebut. Oleh karena itu dalam memahami konsep keamanan komprehensif kita juga harus memandang adanya kompleksitas dunia saat ini yang semakin independen. Adanya kerja sama atau kebijakan yang bersifat komprehensif pada dasarnya juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan²⁴.

Berdasarkan konsep keamanan komprehensif, tentunya kita melihat bahwa ancaman keamanan yang dapat ditimbulkan oleh WNI Eks-ISIS ini tidak hanya dari

²² Al A'raf Al A'raf, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015), 27-40 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.11>>.

²³ Annisa Rizky Aulia and Dkk, *Keamanan Komprehensif*, 2014.

²⁴ Aulia and Dkk.

sisi militer. WNI Eks-ISIS ini pada akhirnya juga dapat mengancam sektor politik, keamanan, bahkan sosial budaya yang mana beberapa sektor ini nantinya akan dijabarkan oleh penulis di bab hasil dan pembahasan. Dan jika kita amati lagi, adanya kebijakan Pemerintah dalam menolak kepulangan WNI Eks-ISIS adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga keamanan Indonesia.

Maka dengan seluruh metodologi yang akan dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini, maka hal ini diharapkan akan memudahkan para pembaca dalam memahami, mencermati, dan memilah apa-apa saja yang penting dalam penelitian ini, baik itu dari masyarakat umum, maupun kalangan akademisi.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya dan konsep keamanan komprehensif di atas, penulis disini melihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa pemerintah menolak kepulangan WNI Eks-ISIS, seperti karena faktor keamanan, faktor sosial, faktor politik, faktor budaya, bahkan ada faktor yang berasal dari dinamika politik internasional. Maka dari itu berdasarkan penelitian terdahulu penulis disini menyimpulkan bahwa ada dua faktor utama dalam kebijakan penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia, yakni:

Faktor Internal

1. Faktor Politik

Dalam usaha merekrut anggota, ISIS seringkali melakukan ideologisasi untuk menarik minat dan simpati umat muslim yang ada di berbagai belahan dunia. Selain memiliki tujuan untuk mendirikan negara Khilafah Islam, ideologi ISIS sendiri juga bersifat "*takfir*" (mengkafirkan orang yang tidak memiliki ideologi sepaham dengan mereka)²⁵. Selain mengkafirkan, isi ideologi tersebut juga membolehkan untuk membunuh orang lain jika mereka tidak memiliki ideologi yang sepaham dengan mereka, bahkan jika termasuk dari umat muslim sendiri. Ideologi yang bersifat takfir dan bunuh-membunuh ini pada akhirnya mengingatkan kita pada kelompok Islam radikal di Mesir bernama Al-Takfir wa Al-Hijrah. Kelompok ini merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Mesir yang ke-3, yakni Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981²⁶. Dari hal ini kita bisa melihat, bahwa dengan ideologi yang mereka miliki, Mesir kemudian dihancurkan oleh mereka. Pada zaman tersebut banyak masjid-masjid di Mesir yang dihancurkan oleh

²⁵ Colleen Murrell, 'The Global Television News Agencies and Their Handling of User Generated Content Video from Syria', *Media, War and Conflict*, 11.3 (2018), 289-308 <<https://doi.org/10.1177/1750635217704224>>.

²⁶ Haryadi and Muthia, Op cit.

kelompok ini. Mereka menganggap bahwa banyak masjid-masjid di Mesir pada saat itu telah menjadi tempat pemujaan yang bersifat musyrik dan sudah keluar dari nilai-nilai syari'at. Hal yang sama saat ini juga terjadi di Afghanistan, dimana saat ini kelompok yang bernama Taliban telah berhasil menguasai seluruh sektor politik yang ada disana. Taliban sendiri merupakan gerakan Islam radikal di Afghanistan yang memiliki ideologi untuk menerapkan nilai-nilai syari'at Islam di seluruh sektor masyarakat Afghanistan. Sama seperti halnya ISIS, kelompok ini terkadang juga melakukan kekerasan demi mencapai tujuan mereka tadi.

Sehingga dari sisi politik sendiri, adanya kepulauan WNI eks-ISIS dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru dalam sisi politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ideologi yang dipakai ISIS sendiri sangat sarat akan sifat politik dan kepentingan²⁷. Terlebih lagi ISIS juga memiliki kemajuan dalam bidang pengetahuan, struktur dan fasilitas yang layaknya dimiliki sebuah negara, maka tidak heran jika organisasi ini dapat melakukan ekspansi dan menciptakan eksistensinya di kawasan lain, terlebih lagi di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya²⁸. Maka dari itu, andaikan pemerintah tetap menerima kepulauan WNI Eks-ISIS ini, ditakutkan nantinya akan berdampak pada warga Indonesia. Dampak yang memiliki kemungkinan besar muncul adalah ideologi ISIS yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga tau bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki umat muslim terbanyak. Sehingga adanya kesamaan teologi dan keimanan ini dikhawatirkan juga akan menarik simpati warga Indonesia untuk membela mereka dan membangkitkan kembali semangat untuk mencapai tujuan mereka²⁹. Tentunya kita tidak ingin apa yang terjadi di Mesir pada tahun 1981 dan yang terjadi di Afghanistan saat ini juga terjadi di Indonesia. Maka dari itu, demi menjaga stabilitas keadaan politik kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi untuk menjaga kedaulatan Indonesia maka pemerintah menolak untuk memulangkan WNI eks-ISIS³⁰.

ISIS di Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa kelompok yang memiliki kepentingan. Salah satunya dari kelompok *Jamaah Anshorut Tauhid* atau yang bisa kita sebut JAT yang diketuai oleh Abu Bakar Ba'asyir³¹. Karena kelompok ini berafiliasi dengan ISIS, maka tak heran mereka juga berusaha merekrut anggota dengan program ideologisasi terhadap umat muslim di Indonesia. Biasanya target utama mereka adalah remaja yang sedang transisi ke dewasa, dan juga orang-orang

²⁷ Imron Rasyid and others, 'Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS', The Habibie Center, 2019.

²⁸ Joko Tri Haryanto, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Multikultural*, 14.3 (2015), 23-40.

²⁹ Keivelyn Lovelycia, 'Indonesia Atas Kepulauan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', 2020, 1213-38.

³⁰ Haryadi and Muthia, Op cit.

³¹ Sukawarsini Djelantik; Taufan Herdarsyah Akbar, 'Terorisme Internasional Dan Fenomena ISIS Di Indonesia', *Lemaba Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Parahyangan*, 2016, 115.

awam yang sedikit memiliki pengetahuan agama. Salah satu contoh dukungan dan pengaruh dari gerakan ini terhadap ISIS adalah ditemukannya 56 WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah, dan juga banyaknya simbol-simbol ISIS di Solo pada tahun 2015 hingga berbagai simbol di media sosial³². Adanya hal ini tentunya akan berpengaruh pada kondisi stabilitas politik Indonesia jika pemerintah tetap memulangkan WNI eks-ISIS ke Indonesia.

2. Faktor Keamanan

Selain dari sisi politik, faktor keamanan merupakan alasan utama yang menjadi penyebab pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS. Sejak ISIS dideklarasikan pada tahun 2014, sudah ada kurang lebih 140 serangan yang dilakukan oleh ISIS di 29 negara dengan korban jiwa yang mencapai kurang lebih 2000 jiwa. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari Deteksi Indonesia, *database* yang berhasil dibuat oleh The Habibie Center menunjukkan ada sekitar 10 kali teror yang telah dilakukan, dan direncanakan yang terinspirasi dari ISIS mulai dari 2017 hingga 2019³³. Bahkan pada tahun 2017 lalu, sudah ada 652 WNI yang terindikasi sebagai kombatan ISIS yang telah kembali ke tanah air. Data yang didapat dari Deteksi Indonesia menunjukkan bahwa sudah terjadi 210 penangkapan terduga teroris dari 2017 hingga sampai Juli 2019. Dalam penangkapan tersebut ada sekitar 554 orang yang diduga teroris. Dari penangkapan tersebut ada 59 orang yang berasal dari ISIS dan 108 lainnya merupakan anggota gerakan teror yang berafiliasi dengan ISIS (JAD dan MIT). Hal yang wajib kita ketahui bahwa selain memiliki ideologi jihadis yang bersifat radikal dan “takfir”, para kombatan eks-ISIS ini juga memiliki keterampilan dan pengetahuan bertempur yang sangat matang layaknya seorang prajurit. Tentunya hal ini juga sangat mengancam keamanan nasional³⁴. Sehingga demi mencegahnya hal tersebut kembali terjadi dan demi menjaga kondisi lingkungan masyarakat agar tetap aman dan tentram maka pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS.

Selain mengetahui model potensi ancaman yang akan dilakukan oleh WNI eks-ISIS ini, pemerintah seharusnya juga perlu untuk memahami karakteristik ancaman itu sendiri. Richard Barret dalam sebuah tulisannya yang dibuat untuk The Soufan Center membagi para simpatisan dan kombatan eks-ISIS ini menjadi 5 bagian, yakni³⁵: *Pertama*, mereka yang sempat tinggal di Suriah dan Irak namun kembali lebih awal. Kategori pertama ini biasanya mereka yang mendapati keadaan disana tidak sesuai dengan mereka yang harapkan. *Kedua*, mereka yang sempat tinggal di Suriah atau Irak dalam cukup waktu yang lama, namun tidak ikut serta dalam

³² M. Zaki Mubarak, ‘DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>>.

³³ Tim The Habibie Center, ‘Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan’, 2018, 8.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

kegiatan ISIS. Kategori kedua ini adalah mereka yang kecewa terhadap ISIS itu sendiri. *Ketiga*, mereka yang kembali setelah puas mendapatkan apa yang mereka inginkan di ISIS. Biasanya adalah orang-orang yang bergabung dengan ISIS atas dasar jiwa petualang mereka dan ketertarikan mereka yang luar biasa terhadap ISIS dan aktivitasnya. *Keempat*, mereka yang ditangkap oleh pihak keamanan disana dan kemudian dideportasi. Terakhir adalah mereka yang dipindahkan ke negara lain untuk membuka kelompok disana atau memang direlokasi oleh pihak ISIS.

Namun terlepas dari seluruh penjelasan di atas, sudah ada kesepakatan mengenai ancaman-ancaman keamanan yang bisa dilakukan oleh orang yang pernah terlibat dengan ISIS, yakni sebagai berikut³⁶: 1. Dapat melakukan aksi teror, 2. Dapat mengkoordinir serangan teror, 3. Dapat membentuk gerakan teroris baru atau bisa memperkuat kelompok yang ada sebelumnya, 4. Dengan status dan kredibilitasnya, ia dapat merekrut anggota baru atau meradikalisasi mereka. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal diatas maka kebijakan pemerintah dalam menolak pulangnyanya kembal WNI eks-ISIS ke Indonesia merupakan sebuah keputusan tepat menurut penulis.

3. Faktor Sosial Budaya

Dari sisi sosial budaya kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang penuh akan keragaman budaya, kepercayaan, suku, dan bahasa. Sehingga tidak heran jika para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang kemudian diterapkan atau dimasukkan di Pancasila dan pembukaan UUD. Apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga kondisi kehidupan sosial Indonesia yang penuh keragaman budaya agar tetap aman dan tentram.

Salah satu nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD adalah sikap toleransi dan penghormatan terhadap hal-hal yang berbeda. Prinsip atau nilai ini pada dasarnya sudah terwujud dalam seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman maka nilai dan prinsip ini sudah mulai hilang pada saat ini. Hal ini bisa kita lihat banyaknya kelompok-kelompok atau gerakan yang selalu membawa isu suku, agama dan ras. Selain itu, mereka juga menebar kebencian.

Ideologi yang tertanam kepada para simpatisan ISIS sendiri sangat bersifat radikal yang mengarah pada sikap intoleran dan aksi teror. Intoleran dan radikalisme pada dasarnya dapat terwujud dalam kekerasan berbasis keyakinan, perusakan tempat ibadah, menebar kebencian pada kelompok tertentu, bahkan hingga pelanggaran tempat ibadah³⁷. Sehingga jika pemerintah menerima kedatangan WNI eks-ISIS ini, maka kemungkinan besar akan menciptakan kondisi sosial masyarakat yang radikal dan intoleran, yang mana hal ini kemudian pada akhirnya juga akan

³⁶ Ibid.

³⁷ Haryadi and Muthia, Op cit.

menggeser atau bahkan nilai atau norma-norma budaya yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia pada dasarnya merupakan negara dengan umat muslim terbanyak, maka tidak akan menutup kemungkinan jika paham radikal dan intoleran akan menggeser nilai atau norma ideologi Pancasila³⁸.

Tidak hanya dari ISIS, Pemerintah saat ini juga mendapati masalah baru dari kelompok atau beberapa gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Saat ini, kelompok ini sering menyebarkan paham baru yang mana sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan tak jarang kelompok ini seringkali menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, andaikan pemerintah menerima kepulangan WNI eks-ISIS maka besar kemungkinan kelompok-kelompok ini akan mendukung atau bersimpati dengan WNI eks-ISIS ini. Selain itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam memahami kelompok Islam yang seperti ini, baik itu dari ideologi mereka maupun kekuatan mereka. Tujuan mereka untuk mendirikan khilafah Islam sangatlah tinggi, terlebih lagi dalam program ideologisasi mereka. Bahkan tak jarang juga kelompok ini seringkali mendapat dukungan politik baik dari suatu kelompok atau individu yang mana hal ini kemudian menyebabkan munculnya berbagai konflik baru di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang dapat mencegah terjadinya hal ini. Salah satunya adalah dengan penolakan kepulangan WNI eks-ISIS ke tanah air³⁹.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kebijakan pemerintah dalam menolak kepulangan WNI eks-ISIS ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Salah satunya adalah kebijakan *Global War on Terrorism* milik Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara terkuat di dunia saat ini bisa kita katakan sebagai negara yang menjadi pemicu dari perkembangan politik global mengenai radikalisme dan terorisme. Dengan agenda utama memerangi terorisme global, Amerika berusaha menggandeng negara-negara didunia dalam upaya penumpasan gerakan radikal dan teror dengan jalan militer⁴⁰.

Awal mula penyebab munculnya kebijakan ini dimulai ketika adanya serangan pada kantor *World Trade Center* (WTC) di New York dan Gedung Pentagon di Washington DC. Serangan ini dilakukan oleh sekelompok teroris dengan pembajakan pesawat dengan Boeing 767-223ER yang kemudian diarahkan pada gedung *World Trade Center* dan *Pentagon* Amerika Serikat. Kala itu pemerintahan

³⁸ Haryadi and Muthia, Op cit.

³⁹ Haryadi and Muthia, Op cit.

⁴⁰ M. Sidi Ritaudin, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', Kalam, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>.

Amerika yang masih dipimpin oleh Presiden George W Bush Jr menetapkan bahwa kelompok jejaring teroris Al-Qaeda yang dibawah oleh Osama bin Laden atas pihak yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa tersebut. Amerika Serikat menduga bahwa penyerangan ini dilakukan oleh Al-Qaeda sebagai aksi balas dendam atas banyaknya intervensi yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah, terutama pada saat Perang Teluk terjadi⁴¹.

Pasca kejadian tersebut, George W Bush dalam pidatonya menyatakan "*every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists*"⁴². Pernyataan Bush tersebut kemudian dikenal masyarakat internasional sebagai kebijakan *Global War on Terrorism*. Selain mengeluarkan kebijakan luar negeri tersebut, George W Bush juga menggandeng Britania Raya serta *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam menjalankan kebijakan GWOT ini. Bahkan Amerika juga berhasil mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB, dan European Union. Adanya 3 dukungan organisasi internasional ini pada akhirnya juga menggerakkan 33 negara-negara lain untuk bekerjasama dengan AS dalam memerangi terorisme⁴³.

Pada akhirnya, adanya GWOT yang menjadi kebijakan utama AS dalam memerangi terorisme juga mempengaruhi negara-negara di dunia, terlebih lagi Indonesia untuk turut ikut serta dalam agenda ini. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk turut ikut serta dalam memerangi terorisme global, Indonesia secara tegas menolak kepulangan WNI eks-ISIS ke tanah air. Mengingat gerakan ISIS sendiri juga merupakan bagian dari Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas penyerangan WTC dan Pentagon pada tahun 2001 lalu.

Penutup

Jika kita simpulkan, *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang bisa kita sebut dengan sebutan ISIS adalah sebuah gerakan radikal dan teror yang memiliki ideologi utama dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam (khalifah). Demi mencapai tujuan tersebut, ISIS seringkali melakukan aksi atau kegiatan yang bersifat teror, salah satu aksi ISIS yang sering kita dapati adalah pemboman yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, bahkan ratusan. Sejak ISIS dideklarasikan pada tahun 2014, sudah ada kurang lebih 140 serangan yang dilakukan oleh ISIS di 29 negara dengan korban jiwa yang mencapai kurang lebih 2000 jiwa. Sejak kematian Abu Bakar Al-Baghdadi, ISIS mengalami kemunduran yang membuat para anggotanya berpikir untuk kembali ke

⁴¹ Naufal Afif Azmi and Arina Wafa Aulia, 'Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) Di Era Donald Trump', *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 281-94.

⁴² Gonda Yumitro, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Global War Against Terrorism', *Prosiding Vennas 7 AIHII Di Universitas Hasanuddin, Makassar, Dengan Tema Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Hubungan Internasional*, November 23., 2016 <<http://eprints.umm.ac.id/37310/3/Yumitro - Kebijakan Terorisme global war civil society kolaborasi.pdf>>.

⁴³ Agus Andriansyah, 'Aktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat Dalam Global War On Terrorism Di Timur Tengah Masa Pemerintahan George W. Bush', 2013.

negaranya masing-masing.

Atas beberapa pertimbangan di atas, seperti radikalisme dan terorisme. Maka pemerintah Indonesia secara tegas menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke tanah air. Selain mengancam keamanan kedaulatan negara dan wilayah regional, ISIS dengan ideologinya pada akhirnya juga akan mengganggu stabilitas politik dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Bahkan efek terparah yang akan ditimbulkan oleh ISIS adalah hilangnya nilai-nilai budaya yang sudah ada di masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS merupakan keputusan yang sangat berkemajuan dan komprehensif guna sebagai pencegahan ancaman dibidang keamanan dalam konsep keamanan komprehensif, dan tentunya keputusan ini juga merupakan keputusan yang paling tepat demi menjaga kehidupan masyarakat, keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Kemudian berdasarkan konsep keamanan komprehensif pada akhirnya dapat kita nilai bahwa keputusan Pemerintah dalam menolak kepulangan WNI-Eks ISIS pada dasarnya juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjaga keamanan di sektor politik, sosial budaya, dan keamanan, terlebih lagi dalam rangka untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini mengingat bahwa dari sektor ke sektor lainnya pada dasarnya memiliki keterikatan. Jika satu sektor mendapat ancaman, maka hal ini juga merupakan ancaman bagi sektor lainnya.

Daftar Pustaka

- Al A'raf, Al A'raf, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015), 27-40 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.11>>
- Abdul Ghafur Santosos, Eiliyah Rifaini, Depiet Pristine Adi, 'Strategi Menghadapi Gerakan ISIS Dan Ancaman Keamanan Di Indonesia', *Journal Civic and Social Studies*, 2020, 1-10
- Akbar, Sukawarsini Djelantik; Taufan Herdarsyah, 'Terorisme Internasional Dan Fenomena ISIS Di Indonesia', *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Parahyangan*, 2016, 115
- Amaliyah, Suci, and Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13
- Andina, Elga, 'Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS', *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12 (2020)
- Andriansyah, Agus, 'Aktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat Dalam Global War On Terrorism Di Timur Tengah Masa Pemerintahan George W. Bush', 2013
- Arif Sumawiharja, Farhan, and Adis Imam Ismunandar, 'Analisis Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-

- Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah)', *Jurnal Keamanan Nasional*, VI.1 (2020), 107
- Aulia, Annisa Rizky, and Dkk, *Keamanan Komprehensif*, 2014
- Azmi, Naufal Afif, and Arina Wafa Aulia, 'Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) Di Era Donald Trump', *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 281-94
- Center, Tim The Habibie, 'Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan', 2018, 8
- Ghita Intan, Sasmito Madrim, 'Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS'
- Hakim, Abdurrahman, and Iffatin Nur, 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS', *Al Daulah*, 9.1 (2020), 81-98
- Haryadi, Aswan, and Nurhasanah Muthia, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1.1 (2018), 1-19 <<https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>>
- Haryanto, Joko Tri, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Multikultural*, 14.3 (2015), 23-40
- Hidayat, A M, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Jurnal Transborders*, 1.1 (2017), 1-19 <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5647%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5647/4/4. BAB II.pdf>>
- Khamid, Nur, 'Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016), 123 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>>
- Lovelycia, Keivelyn, 'Indonesia Atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', 2020, 1213-38
- Miles, Matthew, A. Huberman, and Johnny Saldaña, 'Sampling: Bounding the Collection of Data', *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 26-30
- Mubarak, M. Zaki, 'DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>>
- Muchith, Muhammad, and Muhammad Saekan Muchith, 'Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan', *ADDIN*, 10.1 (2016), 163-80 <<https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>>
- Murrell, Colleen, 'The Global Television News Agencies and Their Handling of User Generated Content Video from Syria', *Media, War and Conflict*, 11.3 (2018), 289-308 <<https://doi.org/10.1177/1750635217704224>>

- Nasution, Syamruddin, 'Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik', *Jurnal An-Nida'*, 41.1 (2017), 1-15
- Oktarina, Dina, and Adhiatma Nanda Wardhana, 'Jihad Melawan Ideologi Radikal ISIS Di Indonesia', *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2016), 187-98. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4626211>>
- Rasyid, Imron, M. Hasan Ansori, Johari Efendi, Sopar Peranto, Vidya Hutagalung, and Muhamad Arif, 'Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS', *The Habibie Center*, 2019
- Rिताudin, M. Sidi, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', *Kalam*, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>
- Tobing, Fredy B.L., and Erwin Indradjaja, 'Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.365>>
- Wardi, Robertus, 'Menhan: 700 WNI Jadi Anggota ISIS'
- Yumitro, Gonda, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Global War Against Terrorism', *Prosiding Vennas 7 AIHII Di Universitas Hasanuddin, Makassar, Dengan Tema Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Hubungan Internasional, November 23., 2016* <<http://eprints.umm.ac.id/37310/3/Yumitro - Kebijakan Terorisme global war civil society kolaborasi.pdf>>